

## Memahami Konsep Dasar Biaya Dan Pembiayaan Pendidikan

<sup>1</sup>Nasrullah Kamaruddin, <sup>2</sup>Mardiyawati, <sup>3</sup>Moh. Wayong

<sup>1,2,3</sup>Magister Manajemen Pendidikan Islam - Pasca Sarjana - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>nasrullah121288@gmail.com

<sup>2</sup>muhammad.ramli@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup>mardiah.hasan@uin-alauddin.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Maret, 10, 2026

Revised Maret, 20, 2026

Accepted April, 13, 2026

Available online Juni 2026

#### Kata Kunci:



[BY-SA](#) license. This is an open access article under the [CC](#)

Copyright © 2025 by Author. Published by KABARMOE Indonesia Timur.

### ABSTRAK

Biaya pendidikan dan pembiayaan pendidikan sering dipakai secara bergantian, padahal keduanya mempunyai penekanan yang berbeda. Biaya pendidikan berhubungan dengan besaran kebutuhan dana yang harus ditanggung untuk menjalankan pendidikan, sedangkan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan proses mendapatkan, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana itu. Ketidakjelasan membedakan dua konsep ini dapat menimbulkan salah paham dalam penyusunan anggaran, penentuan prioritas belanja, maupun evaluasi efisiensi lembaga pendidikan. Klasifikasi biaya pendidikan meliputi biaya investasi, operasional, personal, biaya langsung, dan

biaya tidak langsung. Adapun pembiayaan pendidikan menuntut pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengelola pembiayaan secara tepat sasaran.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses terencana untuk mengembangkan potensi manusia melalui kegiatan belajar, pembinaan karakter, dan penguatan kompetensi. Agar proses tersebut berlangsung secara teratur, lembaga pendidikan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Salah satu unsur penting yang menentukan keberlangsungan layanan pendidikan adalah tersedianya biaya serta adanya sistem pembiayaan yang mampu mengelola dana tersebut secara tepat.

Dalam praktiknya, istilah biaya pendidikan dan pembiayaan pendidikan sering dipakai secara bergantian, padahal keduanya mempunyai penekanan yang berbeda. Biaya pendidikan berhubungan dengan besaran kebutuhan dana yang harus ditanggung untuk menjalankan pendidikan, sedangkan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan proses mendapatkan, mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana itu. Ketidakjelasan membedakan dua konsep ini dapat menimbulkan salah paham

dalam penyusunan anggaran, penentuan prioritas belanja, maupun evaluasi efisiensi lembaga pendidikan.

Pada tingkat kelembagaan, pemahaman terhadap biaya dan pembiayaan pendidikan sangat penting karena menyangkut keberlanjutan program, kualitas layanan, dan pemerataan akses belajar. Lembaga pendidikan yang memiliki perencanaan pembiayaan yang baik akan lebih mampu menjaga mutu pembelajaran, memelihara sarana prasarana, dan menjawab kebutuhan peserta didik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman konseptual mengenai biaya dan pembiayaan pendidikan perlu disusun secara sistematis agar dapat dijadikan dasar analisis dan pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu; (a) Bagaimana pengertian dasar biaya pendidikan; bagaimana hakikat pembiayaan pendidikan; dan (b) bagaimana klasifikasi biaya dalam penyelenggaraan pendidikan;

## PEMBAHASAN

### **A. *Pengertian Dasar Biaya Pendidikan***

Biaya pendidikan dapat dipahami sebagai seluruh pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk uang, barang, tenaga, maupun kesempatan yang dikonversi dalam nilai ekonomi. Dalam konteks lembaga pendidikan, biaya muncul karena adanya kebutuhan untuk menyediakan guru, sarana prasarana, media pembelajaran, layanan administrasi, pemeliharaan lingkungan belajar, dan kebutuhan peserta didik.

Konsep biaya pendidikan menempatkan kebutuhan dana sebagai titik perhatian utama. Dengan demikian, pembicaraan mengenai biaya berfokus pada pertanyaan: berapa besar dana yang dibutuhkan, untuk komponen apa saja, siapa yang menanggungnya, dan bagaimana struktur kebutuhannya. Dari sudut ini, biaya pendidikan menjadi instrumen untuk membaca kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan secara terukur.

### **B. *Hakikat Pembiayaan Pendidikan***

Pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas dibanding biaya pendidikan. Jika biaya menunjuk pada kebutuhan dana, maka pembiayaan menunjuk pada keseluruhan proses pengelolaan dana tersebut. Pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan anggaran, penentuan prioritas, pengadaan sumber dana, penggunaan dana, pengendalian, pelaporan, hingga evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengeluaran.

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan menuntut kecakapan manajerial. Pengelola pendidikan tidak hanya harus mengetahui kebutuhan biaya, tetapi juga harus memastikan bahwa dana yang tersedia mampu dipakai secara tepat sasaran, tidak boros, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dalam kerangka ini, pembiayaan pendidikan berhubungan langsung dengan tata kelola lembaga, mutu layanan, dan kepercayaan publik.

**C. Klasifikasi Biaya Pendidikan**

Secara umum, biaya pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, biaya investasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan aset jangka panjang seperti tanah, gedung, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan pengembangan sistem. Kedua, biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk mendukung kegiatan harian, seperti gaji pegawai, listrik, air, internet, bahan ajar, dan pemeliharaan. Ketiga, biaya personal, yaitu biaya yang ditanggung peserta didik atau keluarga, seperti transportasi, seragam, alat tulis, konsumsi, dan kebutuhan belajar lain.

Biaya juga dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang secara nyata dipakai untuk kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung terlihat dalam kelas, tetapi tetap memengaruhi kelangsungan pendidikan, misalnya biaya kesempatan yang hilang ketika peserta didik memilih bersekolah daripada bekerja. Klasifikasi ini penting untuk membantu lembaga membaca struktur pengeluaran secara lebih cermat.

**Tabel 1. Perbedaan Konseptual Biaya Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan**

| Aspek     | Biaya Pendidikan                                                                  | Pembiayaan Pendidikan                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Makna     | Seluruh pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk menyediakan layanan pendidikan. | Proses merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan dana pendidikan.       |
| Objek     | Kebutuhan dana pada program, kegiatan, satuan pendidikan, dan peserta didik.      | Sumber dana, anggaran, mekanisme belanja, pengawasan, dan pelaporan.                   |
| Orientasi | Berpusat pada jumlah kebutuhan biaya.                                             | Berpusat pada tata kelola agar kebutuhan dapat terpenuhi secara efektif.               |
| Contoh    | Biaya buku, listrik, gaji, pemeliharaan gedung, dan biaya pribadi peserta didik.  | Penyusunan RKAS, pencairan dana BOS, audit internal, serta evaluasi efisiensi belanja. |

**D. Sumber dan Mekanisme Pembiayaan**

Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua peserta didik, lembaga mitra, dunia usaha, serta bantuan sosial atau filantropi. Dalam pendidikan formal, pemerintah biasanya menjadi sumber utama untuk menjamin akses dan layanan dasar, sedangkan masyarakat dan orang tua berperan melengkapi kebutuhan tertentu sesuai kebijakan dan tingkat pendidikan masing-masing.

Mekanisme pembiayaan yang baik harus diawali dengan identifikasi kebutuhan, dilanjutkan penyusunan anggaran, penetapan prioritas, penyaluran dana, pelaksanaan belanja, pencatatan penggunaan dana, serta evaluasi dan pelaporan. Setiap tahap harus memiliki indikator yang jelas agar

dana tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi proses belajar. Karena itu, pembiayaan pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari manajemen strategis lembaga pendidikan.

### E. Prinsip Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Efektivitas berarti dana yang dikeluarkan benar-benar mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat tanpa mengurangi mutu layanan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai asal dana, jumlah, dan penggunaannya. Akuntabilitas menghendaki adanya pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Selain itu, keadilan perlu dijaga agar pembiayaan tidak menimbulkan ketimpangan akses di antara peserta didik. Keberlanjutan juga penting karena pendidikan adalah layanan jangka panjang; oleh sebab itu, pendanaan tidak boleh bersifat sesaat dan tanpa perencanaan. Lembaga pendidikan harus mampu menata pembiayaan secara berkesinambungan agar program yang sudah direncanakan tidak berhenti di tengah jalan karena lemahnya dukungan dana.

### F. Peta Konsep

Untuk memudahkan pemahaman, hubungan antara biaya pendidikan dan pembiayaan pendidikan dapat dipetakan dalam bagan berikut. Peta konsep ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan berkaitan dengan jenis kebutuhan dana, sedangkan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan tata kelola dana. Keduanya bertemu pada tujuan akhir berupa terselenggaranya layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan bermutu.

**Gambar 1. Peta Konsep Biaya dan Pembiayaan Pendidikan**



### G. Analisis Implementatif

Dalam pelaksanaan di lapangan, persoalan biaya dan pembiayaan pendidikan tidak hanya terletak pada kecil atau besarnya dana, tetapi juga

pada ketepatan prioritas. Lembaga yang menerima dana cukup besar belum tentu mampu menghasilkan mutu yang baik apabila penganggaran tidak diarahkan pada kebutuhan inti pembelajaran. Sebaliknya, lembaga dengan dana terbatas masih dapat menjaga kualitas tertentu jika memiliki skala prioritas yang jelas, pengawasan yang kuat, dan budaya hemat yang produktif.

Karena itu, pemahaman tentang konsep dasar biaya dan pembiayaan pendidikan harus dilanjutkan dengan kemampuan membaca kebutuhan riil satuan pendidikan. Pengelola perlu membedakan belanja yang benar-benar mendukung pembelajaran dengan belanja yang bersifat pelengkap. Penguatan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi menjadi langkah penting agar pembiayaan pendidikan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan mutu, akses, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Bila konsep ini diterapkan secara konsisten, maka lembaga pendidikan akan lebih mudah menyusun rencana kerja yang realistis, menentukan sumber dana yang sesuai, menghindari pemborosan, serta menilai apakah pengeluaran yang dilakukan telah sejalan dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, biaya dan pembiayaan pendidikan harus dipahami sebagai dua konsep yang berbeda namun saling melengkapi dalam manajemen pendidikan.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Biaya pendidikan adalah seluruh kebutuhan ekonomi yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan, sedangkan pembiayaan pendidikan adalah proses merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi dana pendidikan. Perbedaan keduanya terletak pada titik tekan: biaya berfokus pada kebutuhan dana, sedangkan pembiayaan berfokus pada tata kelola dana.

Klasifikasi biaya pendidikan meliputi biaya investasi, operasional, personal, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Adapun pembiayaan pendidikan menuntut pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengelola pembiayaan secara tepat sasaran.

### **B. Implikasi**

Implikasinya, setiap lembaga pendidikan perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, memperjelas prioritas belanja, membuka pelaporan yang dapat diakses, dan melakukan evaluasi berkala terhadap hasil penggunaan dana. Langkah tersebut akan membantu lembaga menjaga mutu layanan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64.
- Harsoyo, R. (2022). Teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dan aplikasinya dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247–262.
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalasari, N. (2024). Evaluasi mutu pendidikan menggunakan pendekatan teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 2(1), 34–43.
- Setiawan, I., Zohriah, A., Firdaos, R., & Syaripudin, E. (2024). Strategi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan teori POAC Terry. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(1), 117–117.
- Sartati, & Jamilus, J. (2025). Teori dan praktik supervisi pendidikan: Membangun mutu pembelajaran yang berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Tarbawi Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 210–226.
- Komariyatul, M., & Romi, F. (2025). Integrasi teori trilogi Juran dan teori PDCA Edward Deming dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. *Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan (Cet. ke-6)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Matin. (2014). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Konsep dan aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, D. (2010). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, A. (2013). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Sopiali, A. (2018). Teori dan konsep dasar pembiayaan (cost) dalam pendidikan Islam: Rencana, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2).
- Oktaria, N. (2022). Konsep pembiayaan pendidikan dalam perspektif Islam. *UNISAN Jurnal: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 1(4), 138–148.
- Solehan. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- In'am, A., & Ma'sum, T. (2024). Analisis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *JIE: Journal of Islamic Education and Management*, 6(1), 1–14.
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3).
- Nover, F., Us, K. A., & Shalahudin. (2025). Konsep dan praktik manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64.